

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*.

Jakarta: kemitraan

Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Djohan, Djohermansyah, 2007, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di*

Tingkat Lokal, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Haris, Syamsuddin (Editor). 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah:*

Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah.

Jakarta: LIPI Press

Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam*

Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: PT Rineka

Cipta

- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum*. Yogyakarta: Total Media
- Kumotrotomo, Wahyudi. 2007. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moerdiono (dkk). 1992. *Birokrasi dalam Administrasi pembangunan: beberapa pemikiran pemecahan*. Jakarta: pustaka sinar harapan
- Ndraha, Taliziduhu Ndraha. 2005. *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Osborne, David dan P. Plastrik (terj.). 2000. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: Penerbit PPM
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa: Untaian Pemikiran Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Said, M. Mas'ud. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*. Malang. UMM PESS

Salam, Dharma Setyawan, 2005, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Sedarmayanti.. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Bandung*: Alfabeta

Sulistiayni, Ambar T (Editor). 2004. *Memahami Good Governance: Dalam Presepektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media

Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Thoha, Miftah. 2002. *Prespektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jilid II. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul.1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Imlementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia

Widjaya, H.A.W. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* Jakarta: Pt Radja Grafindo

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan

C. JURNAL

Loina Lalolo. K. P, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Agustus 2003, [www.goodgovernance bappenas.go.id](http://www.goodgovernance.bappenas.go.id)

M Mas'ud Said. *UU Otonomi Baru dan Peran Strategis Kecamatan*, Kompas, Senin, 20

Desember 2004. www.kompas.com

Sofian Effendi, *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*, 22

September 2005. www.setneg.go.id

Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama, Yogyakarta, 22

September 2005 sofian.staff.ugm.ac.id

Taufiq Effendi, *Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*,

Jumat, 09 Februari 2007. www.setneg.go.id

Tri Widodo Utomo. *Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada*

Kecamatan dan Kelurahan. Bandung, 7 Agustus 2004 www.geocities.com

Coba Jadikan Kecamatan Sebagai Wilayah "Semi Otonom", *Pikiran Rakyat*. Sabtu, 28

Agustus 2004

Sadu Wasistiono, *Optimalisasi Peran Dan Fungsi Kecamatan Dalam Rangka*

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. 11 Februari 2007 situbondo.go.id.

D. INTERNET

<http://repository.untag-sby.ac.id/1744/2/Bab%20II.pdf>

<https://scholar.google.com/>

